

## Menilai Kembali Tata Kelola Keuangan Publik: Efektivitas Manajemen Transfer Pusat ke Daerah dalam Mendorong Kinerja Pembangunan Regional

Siti Rahma Alfianti<sup>1</sup>, Dyah Sukmawati<sup>2</sup>, Diding Bajuri<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

<sup>3</sup>Universitas Majalengka

Email: [sitirahmaal@gmail.com](mailto:sitirahmaal@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Mendukung Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Sesuai hasil penelitian bahwa Berdasarkan analisis efektivitas pengelolaan dana transfer pusat ke daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara, terdapat beberapa hambatan utama yang mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pembangunan. Hambatan tersebut dikategorikan dalam tiga dimensi utama: (1) Satuan Waktu Pengelolaan dana masih mengalami kendala berupa keterlambatan dalam proses birokrasi, koordinasi yang kurang efektif antar instansi. (2) Satuan Hasil Realisasi penggunaan dana belum sepenuhnya optimal karena alokasi yang tidak selalu sesuai dengan prioritas pembangunan, (3) Kualitas Kerja – Masih ditemukan kekurangan dalam aspek kompetensi SDM, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

**Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan Dana, Pengelolaan Keuangan Daerah.**

### ABSTRACT

*This research aims to qualitatively describe and analyse the Effectiveness of Central-to-Regional Transfer Fund Management at the Regional Financial and Asset Management Agency in Supporting Development in North Lampung Regency. According to the research findings, based on the analysis of the effectiveness of central-to-regional transfer fund management by the Regional Financial and Asset Management Agency of North Lampung Regency, there are several main obstacles that reduce efficiency and effectiveness in supporting development. These obstacles are categorised into three main dimensions: (1) Time Unit of Fund Management still faces challenges such as delays in the bureaucratic process and ineffective coordination between agencies. (2) Output Unit of Fund Utilisation realisation is not yet fully optimal due to allocations that do not always align with development priorities. (3) Work Quality – There are still deficiencies in the aspect of human resource competence, lack of transparency, and accountability in fund management.*

**Keywords: Effectiveness of Fund Management, Regional Financial Management.**

### Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendorong pembangunan wilayah (Sofilda et al., 2023). Kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan

instrumen strategis untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan dana transfer menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah (Sostar et al., 2023).

Dana transfer pusat mencakup berbagai skema, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan untuk mendukung kebutuhan belanja daerah sesuai prioritas Pembangunan (Mutihah, 2018). Pengaturan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyerap anggaran secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan dana memberikan dampak nyata bagi masyarakat (Bahtiar, 2024). Di tingkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pengelolaan dana transfer. Kinerja lembaga ini sangat menentukan kualitas implementasi program pembangunan. Namun demikian, berbagai kendala masih ditemukan dalam praktik pengelolaan dana, seperti keterlambatan proses administrasi, ketidaksesuaian antara alokasi dan prioritas pembangunan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal (Tomu et al., 2024).

Fenomena tersebut juga tercermin pada pengelolaan dana transfer di Kabupaten Lampung Utara. Data tiga tahun terakhir menunjukkan masih adanya dana yang belum terserap secara maksimal. Meskipun secara persentase tingkat realisasi tergolong tinggi, sisa anggaran yang tidak terserap mengindikasikan adanya hambatan teknis maupun manajerial dalam proses pengelolaan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi capaian pembangunan daerah apabila tidak segera diidentifikasi dan dievaluasi secara komprehensif. Secara konseptual, efektivitas pengelolaan dana dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, antara lain ketepatan waktu pelaksanaan, kesesuaian hasil dengan target yang ditetapkan, serta kualitas pelaksanaan pekerjaan. Ketiga aspek tersebut mencerminkan sejauh mana pengelolaan dana transfer mampu memenuhi tujuan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya berfokus pada besaran penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas outcome yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dana transfer pusat ke daerah pada BPKAD dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai kinerja pengelolaan dana transfer serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Efektivitas Pengelolaan Dana**

Efektivitas dalam konteks administrasi publik merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara terarah (Omelchuk et al., 2020). Dalam pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, efektivitas tidak hanya diukur dari

terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu mendorong realisasi program pembangunan sesuai prioritas daerah. Dengan demikian, efektivitas menekankan pada kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai (Pambudi, 2024).

Secara konseptual, efektivitas organisasi publik dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, ketepatan strategi, kecukupan sumber daya, serta sistem koordinasi yang berjalan baik (Zada et al., 2023). Dalam tata kelola keuangan daerah, dimensi tersebut tercermin pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang realistis, melaksanakan program tepat waktu, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan. Pengelolaan dana transfer yang efektif mensyaratkan sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan kebutuhan pembangunan daerah (Masdar et al., 2021).

Dalam praktiknya, pengukuran efektivitas pengelolaan dana transfer dapat dianalisis melalui indikator ketepatan waktu penyaluran, kesesuaian penggunaan dengan rencana kerja pemerintah daerah, serta dampak nyata terhadap pembangunan. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya dipahami sebagai capaian administratif, melainkan juga sebagai kontribusi riil terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Permatasari et al., 2021).

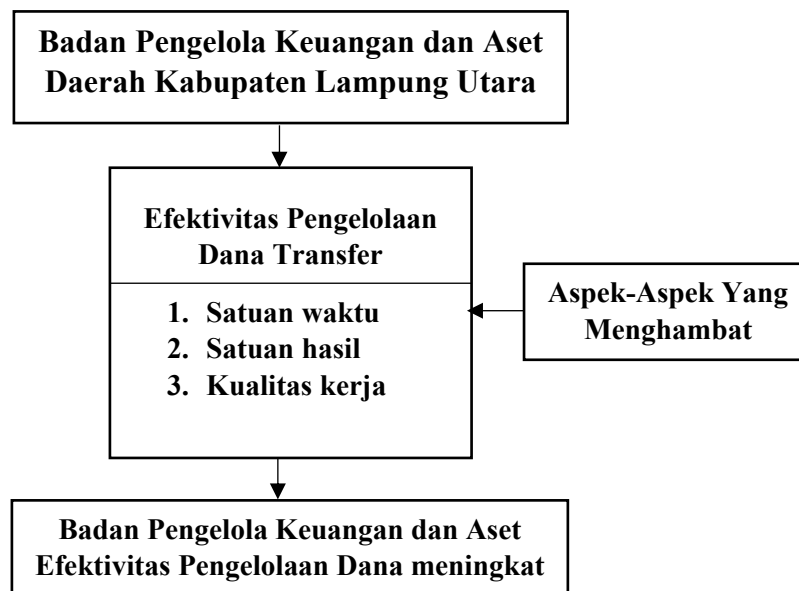
### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah (Sipayung & Cristian, 2022). Kerangka hukum pengelolaan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam tata kelola fiskal daerah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berfungsi sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Amelia et al., 2021). Pemerintah daerah melalui perangkat teknisnya bertanggung jawab mengintegrasikan dana tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terstruktur. Pengelolaan yang baik menuntut adanya sistem administrasi yang tertib, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang konsisten (Zinatifar et al., 2025).

Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih sering muncul, seperti keterlambatan pencairan, lemahnya perencanaan berbasis kinerja, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi keuangan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan penerapan pengawasan berbasis hasil menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana transfer pusat agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah (Illa & Violita, 2025).

## Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Firman, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini berperan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan penggunaan dana transfer pusat di daerah.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui informan yang dipilih secara purposive, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Informan penelitian terdiri dari Kepala BPKAD, Kasubag Pengelolaan Keuangan, serta 3 orang staf yang terlibat dalam pengelolaan dana transfer pusat. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi untuk mengamati secara langsung proses kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dana, wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dari para informan, serta dokumentasi berupa laporan keuangan, dokumen perencanaan pembangunan, dan berbagai arsip yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan

sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data (Waruwu, 2024). Melalui proses tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana transfer pusat ke daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah Pada BPKAD Dalam Mendukung Pembangunan Di Kabupaten Lampung Utara**

#### **1. Satuan Waktu**

Pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer kepada pemerintah daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Fiskal. Di Kabupaten Lampung Utara, pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui tahapan perencanaan, penyaluran, hingga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterlambatan administrasi, verifikasi dokumen, serta ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran.

Ditinjau dari aspek waktu, efektivitas pengelolaan dana transfer sangat dipengaruhi oleh ketepatan pencairan dan realisasi anggaran yang selaras dengan jadwal perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam proses pencairan maupun penggunaan dana dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan serta menurunkan tingkat serapan anggaran. Proses verifikasi dokumen menjadi salah satu tahapan penting yang menentukan kelancaran pencairan dana, karena setiap dokumen harus dipastikan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum proses penyaluran dilakukan. Selain itu, perencanaan anggaran yang kurang matang juga dapat menyebabkan revisi anggaran yang memerlukan waktu tambahan sehingga mempengaruhi kelancaran realisasi program pembangunan.

Secara umum, efektivitas pengelolaan dana transfer di Kabupaten Lampung Utara masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti koordinasi antarinstansi, ketepatan penyampaian data dari unit kerja terkait, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola administrasi keuangan daerah. Ketidaksesuaian antara waktu penyaluran dana dari pemerintah pusat dengan jadwal pelaksanaan pembangunan di daerah juga menjadi salah satu tantangan yang sering dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, perbaikan sistem administrasi, serta penguatan perencanaan anggaran agar pengelolaan dana transfer dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara optimal.

#### **2. Satuan Hasil**

Pembangunan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan berbagai

bentuk dana transfer kepada pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta dana insentif fiskal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara, pengelolaan dana transfer tersebut secara umum telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelaksanaan program pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Evaluasi program juga dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah dana transfer yang diterima setiap tahun tidak selalu berbanding lurus dengan optimalnya hasil pembangunan. Tingginya tingkat penyerapan anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan program apabila dampak pembangunan yang dihasilkan masih terbatas. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterlambatan proses pencairan anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan program yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi geografis, kendala teknis di lapangan, dan fluktuasi harga material juga dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan, khususnya pada proyek infrastruktur.

Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana transfer perlu dievaluasi tidak hanya dari aspek administratif dan realisasi anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan terhadap pembangunan daerah. Penilaian tersebut dapat dilihat dari kontribusi program terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui evaluasi yang lebih komprehensif dan perencanaan yang berbasis kebutuhan daerah, pengelolaan dana transfer diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara.

### 3. Kualitas Kerja

Efektivitas pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Utara. Dana transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Fiskal dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan dana tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, melainkan juga pada kualitas pengelolaan yang meliputi proses perencanaan, penyaluran, administrasi keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil wawancara dengan pihak BPKAD menunjukkan bahwa proses pencairan dan pelaporan dana telah dilakukan sesuai prosedur, meskipun koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan anggaran tidak mengalami keterlambatan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana transfer masih menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan kualitas kerja aparatur. Permasalahan tersebut antara lain perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan pembangunan daerah, kompleksitas prosedur administrasi yang dapat memperlambat proses pencairan dana, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, serta sistem pengawasan yang masih perlu diperkuat. Selain itu, masih ditemukan kendala dalam ketepatan pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja yang cenderung berfokus pada tingkat

penyerapan anggaran tanpa memperhatikan dampak program terhadap pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas kerja aparatur sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana transfer.

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kualitas kerja dalam pengelolaan dana transfer menjadi aspek penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara optimal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat perencanaan anggaran berbasis data, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, pengelolaan dana transfer diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah oleh BPKAD dalam Mendukung Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara**

Pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Kendalakendala ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu Efisiensi Waktu, Efektivitas Hasil, dan Kualitas Kinerja. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dalam masing-masing aspek tersebut:

1. Efisiensi Waktu. Kendala dalam aspek efisiensi waktu berkaitan dengan keterlambatan dalam proses perencanaan, pencairan, dan pelaksanaan anggaran, antara lain:

Sejumlah kendala administratif masih mempengaruhi kelancaran pengelolaan dan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu permasalahan utama berkaitan dengan prosedur birokrasi yang relatif kompleks, sehingga proses pencairan dana memerlukan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan. Kondisi tersebut juga diperparah oleh keterlambatan dalam penyusunan dokumen administrasi keuangan, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang merupakan persyaratan penting dalam tahapan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum berjalan secara optimal. Keterbatasan koordinasi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga berdampak pada keterlambatan penyaluran dana. Permasalahan lain yang turut mempengaruhi adalah keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dari unit pelaksana kegiatan, yang menjadi syarat untuk proses pencairan dana pada tahap berikutnya.

Di samping faktor internal, hambatan juga dapat berasal dari ketidaktepatan jadwal penyaluran dana dari pemerintah pusat. Ketidaksesuaian waktu pencairan dana dengan rencana pelaksanaan kegiatan dapat mengganggu keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif dan berpotensi menunda pencapaian target pembangunan daerah.

2. Efektivitas Hasil (Output Effectiveness)

Kendala yang berkaitan dengan efektivitas hasil dalam pengelolaan dana transfer pemerintah pusat terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ketidaksesuaian antara alokasi dana dengan prioritas kebutuhan daerah sehingga penggunaan anggaran belum sepenuhnya mendukung program pembangunan yang strategis. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah turut mempengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Permasalahan lain juga muncul dalam bentuk rendahnya tingkat penyerapan anggaran yang disebabkan oleh ketidaksiapan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga sebagian dana tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam satu periode anggaran. Di samping itu, proses evaluasi dan pemantauan program masih menghadapi berbagai kendala, sehingga pengukuran terhadap dampak dan keberhasilan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat belum dapat dilakukan secara komprehensif dan akurat.

### 3. Kualitas Kinerja (Work Quality)

Hambatan dalam aspek kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab aparatur dalam mengelola dana publik. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah masih terbatasnya keterbukaan informasi dalam proses pengelolaan anggaran, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan juga belum sepenuhnya memadai, baik dalam pemahaman terhadap regulasi yang berlaku maupun dalam kemampuan teknis pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah.

Permasalahan lain juga berkaitan dengan dukungan sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan dan pengolahan data keuangan belum berjalan secara efisien serta berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Di samping faktor teknis, dinamika politik juga dapat mempengaruhi proses pengelolaan dana, terutama apabila terdapat intervensi kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan. Situasi ini berpotensi menggeser prioritas penggunaan anggaran sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah yang sebenarnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat oleh BPKAD Kabupaten Lampung Utara masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut terlihat pada aspek waktu, hasil, dan kualitas kerja, di mana masih terjadi keterlambatan dalam proses birokrasi dan koordinasi antarinstansi yang berdampak pada pencairan serta pelaporan dana. Selain itu, pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya optimal karena alokasi dana belum selalu selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan tingkat penyerapan anggaran masih rendah akibat ketidaksiapan program. Dari sisi kualitas kerja, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurang optimalnya transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antarinstansi,

peningkatan kapasitas aparatur, penyesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan, serta pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

### Daftar Pustaka

- Amelia, F. A., Azwardi, A., & Sukanto, S. (2021). The Effect of Village Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds on Regional Inequality in the Regencies/Cities of South Sumatra Province. *Oblik i Finansi*, 4(94), 55–61. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-4\(94\)-55-61](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-4(94)-55-61)
- Bahtiar, S. (2024). General Allocation Fund (DAU) and Regional Fiscal Independence: Finding a Balance Point in Central-Regional Relations. *Journal of Management*, 3(2), 821–835. <https://myjournal.or.id/index.php/JOM>
- Firman, F. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.
- Illa, F. P., & Violita, C. E. (2025). Artikel Praktek Kerja Lapang Manajemen Tantangan dan Strategi Pengelolaan Administrasi Keuangan di Tengah Keterbatasan Infrastruktur Digital Pemerintah Daerah. *PKLM*, 1(2), 67–73. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/pklm/>
- Masdar, R., Furqan, A. C., Masruddin, M., & Meldawaty, L. (2021). The role of transparency and professional assistance in regional financial management in the Indonesian regional governments. *Journal of Public Affairs*, 21(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2666>
- Mutiha, A. H. (2018). The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia). *KnE Social Sciences*, 3(11), 609. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2792>
- Omelchuk, O., Koltun, V., Deineha, O., Popov, M., Korchynska, O., & Trusii, O. (2020). Reforming Management Activities To Improve The Efficiency And Effectiveness Of Public Administration. . . *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 9(03), 950–956. [www.ijstr.org](http://www.ijstr.org)
- Pambudi, A. S. (2024). Evaluasi Efektivitas Perencanaan Pusat-Daerah Terkait Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Anggaran Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 22(2), 122–138. <https://doi.org/10.54911/litbang.v22i2.328>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Sipayung, B., & Cristian, R. D. (2022). The Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 356–368. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.92>

- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia. *Cogent Economics and Finance*, *11*(1), 1. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Sostar, M., Ristanovic, V., & de Alwis, C. (2023). Application of Successful EU Funds Absorption Models to Sustainable Regional Development. *Economies*, *11*(9), 1. <https://doi.org/10.3390/economies11090220>
- Tomu, A., Sunardi, S., & Asih, P. (2024). The Importance of Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds, and General Allocation Funds to Improve Economic Growth in District/City Governments in Papua. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, *7*(11), 477–486. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2024.v07i11.004>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *5*(2), 198–211. <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>
- Zada, M., Khan, J., Saeed, I., Zada, S., & Yong Jun, Z. (2023). Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. *Heliyon*, *9*(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15543>
- Zinatifar, Z., Zamani, A., & Asgharpour, R. (2025). Indicators and Components of Human Resource Management with a Public Management Approach. *Annals of Process Engineering and Management*, *2*(2), 112–122.